

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 4 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS
PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PERKARA WANPRESTASI
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Fakultas Agama Islam

Oleh:

QOLBI HANIF FADHLULLOH

I000170030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 4 TAHUN 2019 PERUBAHAN
ATAS PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP
PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGKETA
EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)**

PUBLIKASI ILMIAH

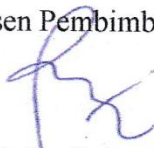
Oleh:

QOLBI HANIF FADHLULLOH

I000170030

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
NIDN. 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 4 TAHUN 2019 PERUBAHAN
ATAS PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP
PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGKETA
EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)**

OLEH:

QOLBI HANIF FADHLULLOH

I000170030

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 9 Agustus 2021.
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Nur Rizqi Febriandika, S.Sy., M.B.A, M.SEI.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat M.Ag.
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 30 Juli 2021

Penulis



QOLBI HANIF FADHLULLOH
I000170030

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 4 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERMA NO. 2
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
TERHADAP PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI
SYARIAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 serta mengetahui keefektifitasannya terhadap perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Sragen. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi kajian bagi penulis lainnya, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya dan masyarakat terhadap peraturan Mahkamah Agung di dalam Pengadilan. Juga dapat menjadi panduan hukum yang berlaku serta arahan bagi masyarakat luas mengenai gugatan sederhana dalam Pengadilan, khususnya Pengadilan agama. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara melalui Hakim Pengadilan Agama Sragen, dan dokumentasi. Lokasi Penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sragen dengan sangat baik telah menerapkan PERMA No. 4 Tahun 2019 pada perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, keefektifitasan dalam penggunaan PERMA No.4 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sragen dirasa masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan selama Tahun 2020.

Kata Kunci: gugatan sederhana, sengketa, wanprestasi, ekonomi syariah.

Abstract

This study aims to analyze the application of PERMA No. 4 of 2019 and to find out its effectiveness in cases of default in sharia economic disputes at the Sragen Religious Court. The benefit of this research is that it can serve as a study for other writers, including universities, other educational institutions and the public, on the Supreme Court's regulations in the Court. It can also serve as a guide to the applicable law as well as a guide for the wider community regarding simple lawsuits in courts, especially religious courts. The research method used was qualitative with observation data collection techniques, interviews through Sragen Religious Court Judges, and documentation. The research was conducted at the Religious Court of Sragen. The results showed that the Sragen Religious Court very well had implemented PERMA No. 4 of 2019 on the case of default in the sharia economic dispute. However, the effectiveness of the use of PERMA No. 4 of 2019 in the Religious Court of Sragen has not shown a significant increase during 2020.

Keywords: small claim court, dispute, breach of contract, sharia economics.

1.PENDAHULUAN

Hukum Perdata merupakan aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Menurut ruang lingkupnya, Hukum Perdata memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, Hukum Perdata mencakup hukum privat materiil yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Adapun dalam arti sempit, Hukum Perdata merupakan lawan dari Hukum Dagang. Jika dilihat dari menurut fungsinya, Hukum Perdata terbagi menjadi 2, yaitu Hukum Materiil dan Hukum Formil. Hukum Materiil umumnya disebut juga dengan Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yakni peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan Hakim.

Dalam jalannya persidangan, terdapat beberapa sumber yang menjadi acuan dalam Hukum Acara Perdata. Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku hingga sekarang belum terkumpul dalam satu kodifikasi. Kendati demikian, sumber tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk nasional setelah Indonesia merdeka.

Hukum Acara Perdata juga memiliki asas-asas yang menjadi ketentuan dasar. Terdapat 10 asas dalam Hukum Acara Perdata, salah satunya adalah Asas Hakim pasif dan aktif. Dalam hukum acara perdata disebut *verhandlungsmaxime*, yaitu pembuktian hanya merujuk kepada peristiwa yang disengketakan saja. Lawan dari *verhandlungs-maxime* adalah *untersuchungs-maxime* yang berarti Hakim wajib mengumpulkan bahan pembuktian untuk kepentingan pemeriksaan sengketa.

Asas Hakim pasif dan aktif mempunyai makna sebagai inisiatif bahwasannya untuk mengadakan acara perdata dilakukan oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim tidak pernah melakukannya. Dalam perkara perdata, pihak yang berkepentingan disebut sebagai penggugat dan tergugat. Tugas Hakim hanyalah membantu untuk mencari keadilan dan berusaha mengatasi masalah agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Gugatan merupakan sebuah tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan. Dalam istilah hukum, pihak yang merasa haknya dirugikan disebut sebagai penggugat. Sedangkan pihak yang telah merugikan hak dari penggugat disebut tergugat. Dalam mengajukan sebuah gugatan, haruslah jelas apa yang dituntut. Jika tidak, maka

Hakim akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam *Reglement of de Rechtsvordering*, Pasal 8 No. 3 memuat pokok-pokok di dalam sebuah gugatan yang terdiri dari identitas pihak, Fundamentum petendi dan petitum. Identitas pihak berisi informasi para pihak seperti memberikan keterangan nama pihak, alamat tempat tinggal para pihak, serta kedudukan para pihak dalam perkara yang diajukan di Pengadilan. Hal ini dimaksud agar tidak terjadinya *error in persona* pada saat jurista melakukan pemanggilan. Fundamentum petendi atau yang lebih dikenal dengan posita merupakan dalil atau alasan yang memuat tentang hubungan hukum antara tergugat dan alasan tuntutnya. Petitum merupakan tuntutan yang diminta oleh pihak penggugat kepada Hakim. Petitum harus diterangkan dalam amar putusan secara jelas dan rinci untuk menghindari gugatan tidak diterima.

Dalam pengajuan gugatan, bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ketentuan tersebut diatur dalam *Het Herzien Indonesisch Reglement* staatsblad Nomor : 44 Tahun 1941. Dalam pasal 118 HIR, menjelaskan tentang bagaimana cara gugatan masuk dalam Pengadilan. Sedangkan dalam pasal 120 HIR menjelaskan tentang mengajukan gugatan dalam lisan. Perlu dicatat, *Het Herzien Indonesisch Reglement* atau biasa disebut HIR dipakai untuk daerah Jawa dan Madura. Untuk reglemen acara hukum yang dipakai diluar daerah Jawa dan Madura adalah *Reglement Tot Regeling Van Het Hechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* atau biasa disebut RBg staatsblad 1927 Nomor : 227 yang tertuang pada pasal 142 dan 144 RBg.

Indonesia memiliki berbagai macam gugatan yang berlaku di dalam Pengadilan. Dalam perkara perdata, dikenal istilah gugatan *voluntair* dan *contentiosa*. Perbedaan yang mencolok dari kedua gugatan tersebut adalah bahwa gugatan *voluntair* merupakan permohonan yang tidak ada sengketa di dalamnya, sedangkan gugatan *contentiosa* dikenal sebagai gugatan perdata yang mengandung sengketa. Dalam perkara perdata juga dikenal istilah gugatan biasa dan gugatan istimewa. Perbedaan mencolok dari kedua gugatan ini terdapat pada permohonan pengajuan. Jika gugatan istimewa wajib mencantumkan kalimat pada petitum yang berbunyi: “*Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul verzet atau banding*”, dalam gugatan biasa tidak ada.

Sejak tanggal 7 Agustus Tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan Sederhana merupakan terobosan dari Mahkamah Agung untuk menyelesaikan gugatan yang bernilai

materiil maksimal 200 juta. Tidak semua gugatan yang bernilai 200 juta bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana. Dalam hal ini, perkara yang bisa diselesaikan oleh gugatan sederhana hanya perkara wanprestasi dan PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Sedangkan perkara hak atas tanah dan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan khusus tidak bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana. Berbeda dengan gugatan biasa, gugatan sederhana dilaksanakan menggunakan Hakim tunggal dan selesai perkara maksimal 25 hari. Putusan dalam gugatan sederhana bersifat hukum tetap jika tidak terjadi permohonan keberatan setelah 7 hari paling lambat pembacaan putusan dan dilaksanakan secara sukarela.

Selang waktu 4 tahun, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 terdapat beberapa ketentuan yang telah dirubah dan ditambah. Tentunya hal tersebut diharapkan menjadi solusi untuk kemudahan bagi para pihak yang berperkara di dalam Pengadilan. Di Pengadilan Agama Sragen sudah menerapkan Gugatan Sederhana pada kasus wanprestasi seperti pada putusan penetapan No. 2 /Pdt.GS/2021/PA.Sr.

Namun, dengan keluarnya PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, pemakaian PERMA No. 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama akan terganggu. Pasalnya, di dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 mengandung beberapa aturan yang diambil dari PERMA No. 2 Tahun 2015.\

Dari latar belakang diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sragen.
2. Untuk mengetahui keefektifitasan PERMA No.4 Tahun 2019 terhadap perkara wanprestasi dalam ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sragen.

2.METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik

pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan melihat kenyataan apa yang terjadi di masyarakat. Untuk mempermudah penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan pustaka yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan gugatan sederhana menurut PERMA No. 4 Tahun 2019 Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Serta dilakukannya wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sragen guna memperoleh informasi terkait penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sragen.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Sragen

Gugatan sederhana merupakan perkara yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum. Karena tujuan awal dibentuknya peraturan terkait gugatan sederhana adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka tidak semua perkara dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana. Menurut Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2019, yang termasuk dalam Gugatan Sederhana adalah kasus ingkar janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Disamping itu dijelaskan juga yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: Perkara yang penyelesaiannya dilaksanakan di Pengadilan khusus seperti yang diatur di dalam peraturan perundang- undangan; atau Sengketa hak atas tanah.

Dalam Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 terdapat satu ayat tambahan yaitu dalam ayat (3a) yang berbunyi “*Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.*” Karena adanya penambahan ayat (3a) dalam pasal 4, Maka ketentuan dalam ayat (4) mengalami perubahan sehingga berbunyi “*Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.*”

1. Tata Cara Pemeriksaan Dalam Gugatan Sederhana

a. Pemeriksaan dan putusan dilakukan oleh Hakim Tunggal.

- b. Tahapan penyelesaian sengketa.
 - (1) Pendaftaran gugatan;
 - (2) Pemeriksaann kelengkapan berkas oleh panitera;
 - (3) Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim;
 - (4) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh panitera;
 - (5) Sidang pertama dengan dilakukannya perdamaian antar pihak oleh Hakim;
 - (6) Jika perdamaian tidak membuahkan hasil, sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian;
 - (7) Putusan.
- c. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari) sejak sidang pertama.
- d. Pengadilan Agama akan membuatkan blanko gugatan sederhana untuk identitas para pihak, posita dan petitum penggugat.
- e. Dalam pendaftaran gugatan sederhana, penunjukan Hakim, serta panitera pengganti dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

2. Ketentuan Pemanggilan Para Pihak

- a. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada sidang hari pertama dengan telah dilakukannya pemanggilan secara patut dan sah.
- b. Untuk tergugat, apabila tidak hadir di dalam sidang hari pertama, makan akan dilakukan pemanggilan kembali yang kedua kalinya. Namun, jika tergugat tetap tidak hadir pada sidang yang kedua, maka putusan akan dinyatakan sebagai putusan *verstek*.
- c. Jika putusan perkara diputus oleh Hakim secara *verstek*, maka tergugat dapat melakukan pelawanan (*verzet*) dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- d. Setelah putusan dibacakan, hakim wajib memberikan informasi mengenai haknya kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum yang berupa keberatan terhadap putusan. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim Tunggal jika menggunakan gugatan sederhana, sedangkan untuk gugatan biasa dilakukan oleh Majelis Hakim. Pengajuan permohonan keberatan disampaikan kepada ketua Pengadilan dengan cara menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera dengan menyertai alasan yang

patut.

3. Pelaksanaan Putusan

- a. Jika tidak terjadi upaya hukum berupa keberatan terhadap putusan, maka putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun apabila terjadi upaya hukum yang berupa keberatan pada putusan, maka putusan tersebut akan tetap mempunyai kekuatan hukum tetap setelah Majelis Hakim memutuskan terhadap keberatannya.
- b. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dilakukan dengan cara sukarela.
- c. Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
- d. Setelah mengeluarkan penetapan *aanmaning*, ketua Pengadilan kembali menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*.
- e. Jika pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari karena sebab faktor kondisi geografis tertentu, maka ketua Pengadilan dapat melebihi ketentuan batas waktu pelaksanaan *aanmaning*.
- f. Jika putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dilakukan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

3.2 Keefektifitasan PERMA No. 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pengadilan Agama Sragen

Menurut Hadi, untuk mengefektifitaskan penerapan gugatan sederhana yang sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ada beberapa tahapan yang harus dilalui pada Pengadilan Agama Sragen.

Tahapan tersebut dimulai dari Ketua Pengadilan yang terlebih dahulu menerbitkan Penetapan Majelis Hakim sekaligus menunjuk Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan. Hakim yang digunakan dalam perkara gugatan sederhana adalah Hakim Tunggal berkompeten yang telah lulus dalam Sertifikasi Ekonomi Syariah. Pemeriksaan perkara oleh Hakim Tunggal dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Hakim harus berperan secara aktif

untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara gugatan sederhana dengan para pihak yang sedang berperkara secara imbang, termasuk memberikan saran kepada para pihak untuk berdamai diluar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian, serta sampai pada penjelasan upaya hukumnya. Setelah Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Majelis Hakim, Panitera akan menunjuk Panitera Pengganti yang bertujuan untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana dalam persidangan.

Dalam tahap pendaftaran, penggugat akan mendaftarkan gugatan dengan mengisi blangko gugatan terlebih dahulu yang telah disediakan oleh Kepaniteraan yang berisikan identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, serta tuntutan yang dilayangkan oleh Penggugat. Jika penggugat menggunakan pengacara, lazimnya adalah penggugat telah mempersiapkan dengan baik mengenai tuntutannya. Selain itu, penggugat harus sudah melampirkan seluruh bukti yang sudah disahkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika seluruh berkas sudah terkumpul dengan persyaratan tersebut, maka akan dilakukan pengkoreksian terhadap berkas tersebut terlebih dahulu sebelum nantinya dicatat dalam buku *register* khusus gugatan sederhana.

Pengkoreksian berkas dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, khususnya mengenai nilai gugatan materiil, para pihak harus bertempat tinggal di satu wilayah dan tidak boleh lebih dari satu pihak, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Jika seluruh data sudah terpenuhi, maka gugatan sederhana akan ditulis dalam buku register khusus gugatan sederhana dan kemudian akan ditentukannya besaran panjar biaya perkara yang harus dipenuhi. Penetapan panjar biaya perkara dilakukan oleh Hakim. Hakim akan menilai apakah perkara masuk ke dalam kriteria gugatan sederhana atau gugatan biasa. Apabila pada tahap tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara telah memenuhi kriteria gugatan sederhana, maka Hakim akan menetapkan hari sidang. Sebaliknya, jika Hakim berpendapat bahwa perkara tidak memenuhi dalam kriteria gugatan sederhana, maka perkara akan dicoret dan sisa dari biaya panjar perkara akan dikembalikan penuh kepada pihak penggugat.

Setelah Hakim menetapkan hari sidang, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak dilakukan paling lama 1 (satu) Minggu. Apabila pihak penggugat tidak hadir pada sidang pertama, gugatan akan dinyatakan gugur serta dianggap tidak bersungguh-sungguh. Namun, jika pihak tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka harus diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk dipanggil kembali. Jika

pihak tergugat pihak tergugat tidak hadir untuk yang kedua kali, Hakim akan terus melanjutkan pemeriksaan perkara dan diputus secara *contradictoir*.

Pada hari sidang pertama, Hakim berupaya untuk mengajak para pihak berdamai dengan memperhatikan batas waktu. Jika para pihak menyepakati untuk berdamai di dalam persidangan, maka Hakim akan membuat putusan *Acta Van Dading*/Akta Perdamaian yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Kendati demikian, apabila perdamaian terjadi diluar persidangan serta tidak melaporkannya kepada Hakim, akan berakibat perdamaian tersebut tidak terikat kepada Hakim.

Apabila perdamaian tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan serta jawaban dari pihak tergugat. Jika jawaban disampaikan secara tertulis, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membuat jawaban yang akan disampaikan pada sidang berikutnya. Namun, apabila jawaban disampaikan secara lisan, pihak tergugat secara langsung diberi kesempatan untuk menjawab yang nantinya jawaban lisan tersebut akan ditulis oleh Panitera dalam berita acara persidangan. Setelah menerima jawaban dari pihak tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Hakim memutus perkara dalam sidang terbuka untuk umum. Jika terjadi keberatan atas putusan perkara, pihak tergugat harus mengajukan berkas permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah berkas dinyatakan lengkap.

Dalam pemeriksaan keberatan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan hanya atas dasar: (1) Putusan dan berkas gugatan sederhana; (2) Permohonan keberatan dan memori keberatan; (3) Kontra Memori Keberatan. Pemeriksaan permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Putusan keberatan akan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan. Putusan keberatan mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak boleh dilakukan kembali upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Pada Tahun 2020, Pengadilan Agama Sragen memiliki 12 perkara sengketa ekonomi syariah. Dari ke 12 perkara tersebut, 5 diantaranya berstatus pencabutan perkara, 1 perkara berstatus gugatan tidak terima, dan 1 perkara berstatus tidak ada/hasil putusan perkara tersebut tidak ditemukan. Di Tahun 2021, Pengadilan Agama Sragen memiliki 1 perkara sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan menggunakan gugatan sederhana.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan sederhana sudah menjadi keharusan bukan lagi menjadi pilihan. Masyarakat sedikit demi sedikit mulai tertarik untuk menggunakan gugatan sederhana pada perkara sengketa ekonomi syariah meskipun belum terlihat kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait mekanisme penyelesaian gugatan sederhana menurut PERMA No.4 Tahun 2019.

Hambatan yang masih terjadi dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sragen yaitu mengenai tugas juru sita pengganti. Dalam pemanggilan para pihak, juru sita pengganti dituntut untuk selalu tepat waktu dalam mengantarkan surat panggilan para pihak. Jika juru sita pengganti tidak tepat waktu dalam mengantarkan surat tersebut, maka nantinya akan dikenakan sanksi berupa peringatan sampai skorsing. Keterlambatan para pihak akan mempengaruhi terhadap waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa pengambilan putusan jika dilakukan oleh Hakim Tunggal diragukan jika dilihat dari segi objektivitas. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa "*Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.*" Menurut Sudikno Mertokusumo, sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang dalam susunan persidangan yang dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang sangat objektif. Kendati demikian, penggunaan Hakim Tunggal hanyalah digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa penetapan Pengadilan seperti penetapan perwalian, pengampunan, dan sebagainya.

4.PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- (1) Pengadilan Agama Sragen Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A merupakan Pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Sragen mempunyai 2 cara untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu dengan menggunakan gugatan biasa dan gugatan sederhana. Jika perkara sengketa ekonomi syariah

diselesaikan menggunakan mekanisme gugatan sederhana, Pengadilan Agama Sragen merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2019. Mekanisme pelaksanaan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun penyelesaian gugatan sederhana pada dasarnya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian perkara gugatan biasa, seperti tidak adanya proses jawab-jawab antar pihak, jangka waktu penyelesaian yang singkat yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, diperiksa oleh Hakim Tunggal yang telah lulus dalam Sertifikasi Ekonomi Syariah. Yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum (dalam hal penggugat berbeda wilayah domisili hukum penggugat harus menunjuk kuasa), subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan (*verzet* atas putusan *verstek*). Dalam hal penggugat berbeda domisili wilayah hukum dengan tergugat, PERMA No. 4 memperbolehkan untuk menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

- (2) Pengadilan Agama Sragen Pengadilan telah menerapkan secara baik terkait PERMA No. 4 Tahun 2019. Dari segi keefektifitasan dalam penggunaan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sragen, masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah gagal dalam tahap pemeriksaan berkas, dan/atau tidak tertarik sehingga memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan model gugatan acara biasa. Meskipun demikian, perlahan masyarakat mulai tertarik akan penyelesaian perkara menggunakan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sragen.

4.2 Saran

- (1) Penyelesaian sengketa gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada baik bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang melahirkan peraturan, Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana penyelesaian gugatan sederhana, maupun bagi

masyarakat sebagai pihak yang berperkara. Semuanya harus bekerja sama satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan.

- (2) Kelompok masyarakat, khususnya kepada lulusan hukum ekonomi syariah harus bahu membahu mensosialisasikan kepada masyarakat awam mengenai penyelesaian perkara dengan menggunakan gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Nevey Varida. 2018. "Gugatan Sederhana Dalam Peradilan Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)". Dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 3.
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2019. *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan*. Jakarta: Djambatan.
- Nasir, M. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya". Dalam *Jurnal Hukum dan Bisnis Investasi: Dialogia Iuridica*, Vol. 8, No. 2.
- Topa, Jeims Ronald. "Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri". Dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 4.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Vollmar, Hendrik Frederik Arnold. 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. I.S. Adiwimarta. Jakarta: Rajawali.